

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemda : Provinsi Jambi
OPD : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
a	b	c																				d	
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																					Memadai	
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai	
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	1	4	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																					Memadai	
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	2	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	2	3	4	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	4	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																					Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	4	4	3	3	4	3	4	2	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																					Memadai	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	2	4	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																					Memadai	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	Memadai

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	2	3	3	2	3	3	4	2	3	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																				SIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20		Modus
a	b	c																				d	
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memadai																					
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	2	4	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	4	4	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/ atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	Memadai																					
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	4	3	3	3	1	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai																					
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/ pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Nama Pemda : Provinsi Jambi			
Tahun Penilaian : 2025			
Urutan Pemerintahan : Urutan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	e
1	LHP-BPK RI	Kelebihan Pembayaran "Honorarium, Narasumber/Praktisi dan Honorarium Pembaca Doa Tidak Sesuai Dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020" sebesar Rp.5.290.000,- dan Kesalahan Pembayaran telah kami kembalikan dengan cara Penyetoran uang ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi Rekening No : 101431703. STS Nomor : 0001/STS-Temuan/DISKOP.UKM/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024	Penegakan Integritas Etika
		Setoran Temuan BPK atas Kelebihan Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas sebesar Rp.2.220.000,- telah kami kembalikan dengan cara Penyetoran uang ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi Rekening No : 101431703. STS Nomor : 0002/STS-Temuan/DISKOP.UKM/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024	Penegakan Integritas Etika
		Pengembalian "Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Atas Double Data Penerima Bantuan DUMISAKE Tahun 2024 Tidak Sesuai Dengan Juknis DUMISAKE Nomor : 25/KEP/DISKOP.UKM-5.3/III/2024" an. Septianada Fhatinabila As sebesar Rp.5.000.000,- telah kami kembalikan dengan cara Penyetoran uang ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi Rekening No : 101431703. STS Nomor : 02/STS-Temuan.BPK/DISKOP.UKM/XI/2024 Tanggal 25 November 2024	Penegakan Integritas Etika
		Kelebihan Pembayaran "Belanja Honorarium Narasumber dan Honorarium Fasilitator Tidak sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023" dan kesalahan pembayaran telah kami kembalikan sebesar Rp.116.470.000,- dengan cara Penyetoran uang ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi Rekening No : 101431703. STS Nomor : 03/STS-Temuan.BPK/DISKOP.UKM/XI/2024 Tanggal 26 November 2024	Penegakan Integritas Etika
2	LHP Inspektorat	Kelebihan Pembayaran "Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak Sesuai Ketentuan" an. Sardaini sebesar Rp.520.000,- dan Kelebihan Pembayaran " Belanja Honorarium PPTK tidak sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020" an. Zuhriyani, ST., M.Si sebesar Rp.2.400.000,- kesalahan pembayaran telah kami kembalikan sebesar Rp.2.920.000,- dengan cara Penyetoran uang ke Kas Umum Daerah Provinsi Jambi Rekening No : 101431703. STS Nomor : 01/STS-Temuan.INSPEKTORAT/DISKOP.UKM/VIII/2024 Tanggal 08 Agustus 2024	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
3	Media Massa	-	
4	DII.	-	-

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Jambi, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi

DKS. SARDAINI, MM
NIP. 19670520 199402 1 001

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Provinsi Jambi**

Nama Pemda Tahun Penilaian		Provinsi Jambi (Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi) : 2025					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai	-	Memadai	-		
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Memadai	-	Memadai	-		
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai	-	Memadai	-		
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan	Memadai	-	Memadai	-		
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang memadai	Pembayaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia tidak sesuai dengan peraturan presiden No 33 tahun 2020	Memadai	-	Kurang memadai	Pembayaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia tidak sesuai dengan peraturan presiden No 33 tahun 2020
			Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016				Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
			Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusulkan untuk dilelang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016				Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusulkan untuk dilelang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
			Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaanya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016				Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaanya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai	-	Memadai	-		
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Memadai	-	Memadai	-		
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai	-	Memadai	-		



Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Provinsi Jambi
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2024
Sumber Data	RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
Tujuan Strategis RPJMD	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas 2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas 2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nama Dinas Terkait	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
Sasaran RPJMD	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima 3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan 4. Meningkatnya industri pengolahan 5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata 6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar 7. Meningkatnya kualitas lingkungan 8. Menurunnya tingkat pengangguran 9. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan 10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 11. Meningkatnya pendidikan 12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya 13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama 14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan
IKU Sasaran RPJMD	3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 3.1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 3.2. Nilai tambah ekonomi kreatif 3.2.1.a. Persentase peningkatan volume usaha koperasi 3.2.1.b. Persentase pertumbuhan omset usaha kecil menengah (UKM) binaan 3.2.2.a. Persentase SDM aparatur, pelaku usaha koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun 3.2.2.b. Persentase koperasi berkinerja baik 3.2.2.c. Persentase koperasi sehat dan cukup sehat 3.2.2.d. Persentase peningkatan UMKM binaan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), 7) Program Pengembangan UMKM, 8) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

<p>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Tujuan Strategis Pemda: 2.Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Sasaran Strategis Pemda: 3.Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata.</p> <p>IK Sastra Pemda: 16.1. Persentase Koperasi yang Berkualitas 16.2. Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha</p>	
		<p>Jambi, Desember 2024 Gubernur Jambi,</p> <p>DR. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Jambi		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2024		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi		
Sumber Data	Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	1.Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas dan UMKM yang produktif dan mampu berdaya saing. 2.Mewujudkan dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik.		
Sasaran Strategis	1.1.Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas. 1.2.Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada peningkatan PDRB. 2.1.Terwujudnya aparatur dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik.		
IKU Renstra OPD	No.	IKU	2025
	1.	Persentase koperasi berkualitas	18.00%
	2.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1.00%
	3.	Raso kewirausahaan daerah	4.00%
	4.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	1.00%
	5.	Persentase pertumbuhan omset UMKM binaan	8.50%
	6.	Persentase pertumbuhan aset UMKM binaan	32.00%
	7.	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	32.00%
	8.	Indeks kepuasan masyarakat	88
	9.	Nilai AKIP	81 (A)
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis OPD: 1.Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas dan UMKM yang produktif dan mampu berdaya saing. 2.Mewujudkan dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik. Sasaran Strategis OPD: 1.1.Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas. 1.2.Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada peningkatan PDRB. 2.1.Terwujudnya aparatur dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik. IK Sasaran Strategis OPD: 3.1. Persentase koperasi berkualitas 3.2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB 3.3. Rasio Kewirausahaan Daerah 3.4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi 3.5. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan 3.6. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM Binaan 3.7. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM 3.8. Indeks Kepuasan Masyarakat 3.9. Nilai AKIP		
		Jambi, Desember 2024 Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi  DRS. SARDAINI, MM. NIP. 19670520 199402 1 001	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Jambi		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2024		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
OPD yang Dinilai	: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi		
Sumber Data	Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan		
Program Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	<p>PROGRAM</p> <p>1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), 6) Program Pengembangan UMKM; 7) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>KEGIATAN :</p> <p>1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 6.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 8.1 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Skala Menengah</p>		
Capaian/Hasil Program	1	Nilai AKIP	81 (A)
	2	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	30
	3	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	50%
	4	Persentase SDM aparatur, pelaku usaha koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	5%
	5	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	6.69%
	6	Persentase peningkatan UMKM binaan	25.6%
	7	Persentase pertumbuhan omset usaha kecil menengah (UKM) binaan	8,5%
Informasi Lain	-		
	<p>Program :</p> <p>1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, 2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, 4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), 6) Program Pengembangan UMKM; 7) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.</p>		

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Jambi								
Nama OPD		: Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi								
Tahun Penilaian		: 2025								
Periode yang dinilai		: 2024								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

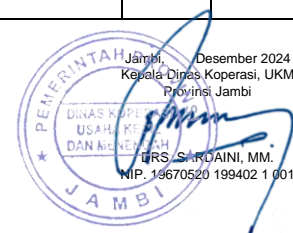
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Jambi Nama OPD : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : 2024 Tujuan Strategis Pemda : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah OPD yang Dinilai : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis OPD : Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas dan UMKM yang produktif dan mampu berdaya saing.									
	Sasaran Strategis OPD:									
1.1	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas.	1,1 Persentase koperasi berkualitas	Koperasi RAT dan Koperasi sehat Rendah	RSO.25.17.20.01	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping Koperasi tidak seimbang dengan jumlah Koperasi yang ada 4 terbatasnya 2 Kurangnya sosialisasi ke Koperasi terkait pembuatan izin koperasi dan pembuatan laporan keuangan 3 terbatasnya anggaran	Internal	C	Rendahnya persentase Koperasi RAT dan Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Masyarakat Pelaku usaha kecil dan menengah
1.2	Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada peningkatan PDRB.	1. Persentase usaha kecil menjadi wirausaha	Legalitas UMKM rendah	RSO.25.17.20.02	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terbatasnya anggaran	Internal	C	Rendahnya persentase usaha kecil menjadi wirausaha	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Masyarakat Pelaku usaha kecil dan menengah
		2. Persentase Pertumbuhan Omset dan UMKM Binaan	SDM Pelaku UMKM Rendah	RSO.25.17.20.03	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terbatasnya anggaran	Internal	C	Rendahnya Omset dan Aset UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Masyarakat Pelaku usaha kecil dan menengah
		Pemasaran produk UMKM masih terbatas		RSO.25.17.20.04	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terbatasnya anggaran	Internal	C	Rendahnya Omset dan Aset UMKM	
		Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah		RSO.25.17.20.05	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terbatasnya anggaran	Internal	C	Rendahnya Omset dan Aset UMKM	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		3. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	UMKM tidak berkembang/tidak naik kelas	RSO.25.17.20.06	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 SDM Pelaku UMKM Rendah 2 Pelaku UMKM belum memanfaatkan media online sebagai sarana pemasaran produknya 3 Akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih rendah 4 Produksi UMKM masih rendah dan tidak konsisten kualitasnya	Eksternal	UC	Rendahnya pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Masyarakat Pelaku usaha kecil dan menengah
2	Tujuan Strategis OPD : Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik									
2.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	1. Predikat AKIP Pemerintah Daerah	Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	RSO.25.17.20.07	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Dokumen AKIP Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi belum memenuhi standar 2. Dokumen administrasi yang belum memenuhi standar	Internal	C	Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi kurang akuntabel	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Masyarakat Pelaku usaha kecil dan menengah



Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum


Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Contoh Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi Jambi Nama OPD : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : 2024 Tujuan Strategis Pemda : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan strategis OPD : 1.Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas dan UMKM yang produktif dan mampu berdaya saing. 2.Mewujudkan dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik. Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah OPD yang Dinilai : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi											
No	Kegiatan	Indikator	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah	Pelaksanaan	Laporan Dokumen evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.25.17.20.01	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya kesadaran dan Pemahaman Pengelola Laporan dalam kewajiban pelaporan tepat waktu	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dan jumlah dokumen hasil penyediaan tugas ASN	Pelaksanaan	Kurang Akuntabelnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.25.17.20.02	Sekretaris Dinas Koperasi	Minimnya ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia SKPD dalam Pengelolaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Internal	C	Hal tersebut menyebabkan perangkat daerah kurang maksimal dalam memahami kewenangan, tugas dan fungsi serta tidak menjalankan Visi dan Misi Kepala daerah secara efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan	Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.17.20.03	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah sdm yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Internal	C	hal ini berdampak pada kinerja perangkat daerah itu sendiri, sehingga capaian kinerja perangkat daerah dan juga realisasi pada sisi anggaran (keuangan/fisik) tidak efektif dan efisien.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, paket peralatan dan perlengkapan kantor, paket bahan logistik kantor, paket barang cetakan dan penggandaan, dan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelaksanaan	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.04	Sekretaris Dinas Koperasi	belum tersedianya data base inventaris kebutuhan yang menjadi dasar perencanaan dan penganggaran kegiatan	Internal	C	hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa, sehingga bahan pertimbangan untuk Pengadaan atau Pemeliharaan tidak terbantunya Perencanaan, Penyaluran, Pemeliharaan, dan Penyimpanan Aset Milik OPD..	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pelaksanaan	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam Perencanaan Penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.05	Sekretaris Dinas Koperasi	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah peralatan yang dibutuhkan pegawai	Internal	C	Apabila pada sub kegiatan ini belum terpenuhi dengan baik, agak menghambat operasional kantor secara keseluruhan.	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Pelaporan	Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	Sekretaris Dinas Koperasi	Kurangnya pemahaman pengurus barang belum memahami format dari Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional sesuai aturan yang berlaku	Internal	C	Berpotensi hilangnya aset kendaraan dinas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
				Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusulkan untuk dilelang	ROO.25.17.20.07	Sekretaris Dinas Koperasi	Kelalaian pengurus barang karena kendaraan dinas roda 4 (empat) dalam kondisi rusak berat belum diusulkan untuk dilelang	Internal	C	Berpotensi kepada tidak ekonomisnya dalam pengelolaan aset negara	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

				Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaanya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan peraturan	ROO.25.17.20.08	Sekretaris Dinas Koperasi	Kelalaian pengurus barang dalam melengkapi pengamanan administrasi kendaraan dinas yaitu belum adanya kartu pemeliharaan kendaraan	Internal	C	Berpotensi kepada pengeluaran belanja pemeliharaan melebihi kebutuhan yang sebenarnya	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
2,1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		pelaksanaan	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi pada pengawas koperasi agar hasil penilaian terhadap kesehatan Koperasi berpredikat 'sehat'/'cukup sehat'	ROO.25.17.20.09	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengurus koperasi dan Tim teknis evaluasi bidang kelembagaan koperasi	Eksternal	UC	Berpotensi rekomendasi yang dikeluarkan tidak layak/menyalahi aturan /regulasi yang ada	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
4,1	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah dalam 1(satu) daerah Provinsi Jambi		pelaksanaan	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi pada pengawas koperasi agar hasil penilaian terhadap kesehatan Koperasi berpredikat 'sehat'/'cukup sehat'	ROO.25.17.20.10	Kepala Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengawas dan pengurus koperasi	Eksternal	UC	Berpotensi hasil penilaian kesehatan yang dikeluarkan tidak layak/menyalahi aturan /regulasi yang ada	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
5,1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		pelaksanaan	Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2024 di Kab/Kota	ROO.25.17.20.11	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Yang menentukan peserta adalah kabupaten/kota	Internal	C	Berpotensi SDM yang mengikuti pelatihan belum tepat sasaran dan hasil dari pelatihan tidak optimal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
6,1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		pelaksanaan	Belum Optimalnya Pembinaan Koperasi di Kabupaten/Kota pada Kegiatan Fasilitasi Koperasi	ROO.25.17.20.12	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	Yang mengikuti pelatihan bukan orang yang kompeten	Internal	C	Berpotensi SDM yang mengikuti pelatihan belum tepat sasaran dan hasil dari pelatihan tidak optimal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
7,1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan			Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terbatasnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	Eksternal	UC	Mengundang UMKM dalam kegiatan sosialisasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
		Jumlah UMKM yang difasilitasi bantuan modal kerja	pelaksanaan	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya anggaran dan terbatasnya SDM yang turun kelapangan untuk melakukan verivikasi	Internal	C	UMKM tidak berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
		Jumlah pelaksanaan desiminasi program dumisake	pelaksanaan	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Pelaksanaan kegiatan belum optimal disosialisasikan menggunakan media elektronik	Internal	C	Program Dumisake tidak diketahui masyarakat luas	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
		Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan dan bantuan peralatan	pelaksanaan	UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksian secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Eksternal	UC	Pelatihan dan peralatan yang diberikan tidak berdampak bagi pertumbuhan dan omset UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
		Jumlah UMKM yang difasilitasi pengurusan izin dan standarisasi produk (Pendamping KUMKM dan Konsultan PLUT)	pelaksanaan	Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.25.17.20.17	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Tenaga yang ada belum seimbang dengan UMKM yang ada	Eksternal	UC	UMKM yang memiliki izin dan standarisasi produk masih rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
		Jumlah dokumen pelaporan honorarium narasumber	Pelaporan	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kurangnya pemahaman terkait peraturan pelaporan pembayaran honorarium yang berlaku	Internal	C	Berdampak terhadap kesalahan pelaporan serta kerugian finansial	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
8,1	Pengembangan Usaha kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM dan Produk UMKM yang difasilitasi kemitraan dan promosi (pendamping KUMKM dan Konsultan PLUT)	Pelaksanaan	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	SDM Pelaku UMKM masih Rendah dan Produk yang dihasilkan belum memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas	Eksternal	UC	UMKM mikro sulit berkembang	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
		Jumlah UMKM yang difasilitasi pelatihan teknologi informasi dan kewirausahaan	pelaksanaan	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Belum dilakukan penyeleksian secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Internal	C	Pertumbuhan kewirausahaan rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat

		Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan (SHAT)	pelaksanaan	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Kegiatan dilaksanakan oleh BPN anggaran untuk kegiatan ini tidak ada	Eksternal	UC	Akses pembiayaan ke perbankan bagi UMKM rendah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Koperasi dan pelaku usaha/masyarakat
--	--	---	-------------	---	-----------------	--	--	-----------	----	--	---

No	Kegiatan	Indikator	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p> Jambi, Desember 2024 Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi DRS. SARDAINI, MM. DAN NIP. 196705201994021001 </p> </div>											
<p>Keterangan :</p> <p>Kolom a diisi dengan nomor urut</p> <p>Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD</p> <p>Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan</p> <p>Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan</p> <p>Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko</p> <p>Kolom f diisi dengan Kode risiko</p> <p>Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko</p> <p>Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : <i>Man, Money, Method, Machine</i> , dan <i>Material</i></p> <p>Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/ internal)</p> <p>Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu</p> <p>Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi</p> <p>Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi</p>											

Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Strategis OPD

Kertas Kerja
Analisis Risiko
Risiko Strategis OPD

Risiko		Hasil Penilaian /Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/aturan yang berlaku	Legalitas UMKM rendah		SDM Pelaku UMKM Rendah		Pemasarannya produk UMKM masih terbatas		Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah		UMKM tidak berkembang /Tidak Naik Kelas		Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	
No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 1		RSO 2		RSO 3		RSO 4		RSO 5		RSO 6	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e
1	Kadis	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	3	2	3	2	4	4	5	5	4	4	3	3
2	Sekdis	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	3	2	3	2	4	4	5	5	4	4	3	3
3	Kabid 1	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4
4	Kabid 2	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4
5	Kabid 3	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4
6	Kabid 4	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	5	5	5	4	5	5	4	4
7	Kasi 1	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	3	3	3	3	3	5	4	4	4	5	4	3
8	Kasi 2	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	3	3	3	3	3	5	4	4	4	5	4	3
9	Kasi 3	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	3	5	4	4	4	3	4	2
10	Kasi 4	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	4	3	4	3	3	5	4	4	4	3	4	2
11	Kasi 5	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	2	2	2	2	3	5	4	4	4	3	4	2
12	Kasi 6	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	2	2	2	2	3	5	4	2	4	3	4	3
13	Kasubag 1	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1	2	1	2	3	3	5	3	3	4	3	3
14	Kasubag 2	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1	2	1	2	3	3	5	1	3	4	3	3
15	Kasubag 3	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	2	1	2	1	2	3	4	3	3	4	1	2
16	Staf 1	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	2	1	2	1	2	3	4	2	3	2	3	2
17	Staf 2	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	2	1	2	1	1	4	4	1	3	3	3	2
Risiko		Hasil Penilaian /Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/aturan yang berlaku	Legalitas UMKM rendah		SDM Pelaku UMKM Rendah		Pemasarannya produk UMKM masih terbatas		Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah		UMKM tidak berkembang /Tidak Naik Kelas		Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	
No.	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 1		RSO 2		RSO 3		RSO 4		RSO 5		RSO 6	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
a	b	c	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e	d	e
18	Staf 3	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1	2	1	2	3	3	4	2	3	3	2	3
19	Staf 4	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1	2	1	2	4	3	4	3	3	3	2	3
20	Staf 5	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1	2	1	2	4	4	4	3	3	3	2	3
Rata-rata			2.13	2.06	2.13	2.06	2.63	3.52	3.67	3.00	3.17	3.46	2.71	2.73

[illegible]

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Pemerintah Provinsi Jambi : 2025			
Tujuan Strategis Pemda		: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.			
Tujuan Strategis OPD		: 1.Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas dan UMKM yang produktif dan mampu berdaya saing. 2.Mewujudkan dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik.			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*) d	Skala Kemungkinan *) e	Skala Risiko f=dxe
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				
II	Risiko Strategis OPD 1:				
1	Hasil Penilaian /Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/peraturan yang berlaku	RSO.25.17.20.01	2.13	2.05	4.35
2	Legalitas UMKM rendah	RSO.25.17.20.02	2.13	2.05	4.35
3	SDM Pelaku UMKM Rendah	RSO.25.17.20.03	2.83	3.82	10.82
4	Pemasaran produk UMKM masih terbatas	RSO.25.17.20.04	3.67	3.00	11.00
5	Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah	RSO.25.17.20.05	3.17	3.45	10.94
6	UMKM tidak berkembang/tidak naik kelas	RSO.25.17.20.06	2.71	2.73	7.39
7	Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	RSO.25.17.20.07	2.13	2.05	4.35
III	Risiko Operasional OPD 1:				
1	Laporan Dokumen Evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.25.17.20.01	1.88	2.13	4.00
2	Kurang Akuntabelnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.25.17.20.02	3.08	1.55	4.63
3	Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.17.20.03	3.54	2.45	6.00
4	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.04	3.46	2.05	5.50
5	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan belum maksimal	ROO.25.17.20.05	3.04	1.95	5.00
6	Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	3.55	2.55	9.04
7	Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum	ROO.25.17.20.07	3.55	2.55	9.04
8	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharannya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan peraturan	ROO.25.17.20.08	3.55	2.55	9.04
9	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi untuk memudahkan pengurusan bahan verifikasi izin usaha simpan pinjam koperasi	ROO.25.17.20.09	3.27	2.55	5.82
10	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi pada pengawas koperasi	ROO.25.17.20.10	3.36	2.45	5.81
11	Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2024 di Kab/Kota	ROO.25.17.20.11	3.36	2.50	5.86
12	Belum Optimalnya Pembinaan Koperasi di Kabupaten/Kota pada Kegiatan Fasilitasi Koperasi	ROO.25.17.20.12	3.32	2.55	5.87
13	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13	3.36	2.45	8.24
14	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14	2.91	2.45	7.13
15	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15	3.23	2.75	8.88
16	UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16	2.77	2.65	7.35
17	Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.25.17.20.17	2.86	2.55	7.30
18	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18	3.36	2.45	8.24
19	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19	3.64	3.00	10.91
20	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20	2.73	2.60	7.09
21	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21	2.73	3.85	10.50

Jambi, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi

DRS. SANDAINI, MM.
DAN NIP. 19670520 199402 1 001

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

MATRIKS ANALISIS RISIKO

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	5					
	Kemungkinan Besar	4			RSO.23.17.20.02 RSO.23.17.20.04 ROO.23.17.20.09		
	Kemungkinan Kecil	3			RSO.23.17.20.01 RSO.23.17.20.06 ROO.23.17.20.04 ROO.23.17.20.05	RSO.23.17.20.03 RSO.23.17.20.05 ROO.23.17.20.01 ROO.23.17.20.02 ROO.23.17.20.03 ROO.23.17.20.06 ROO.23.17.20.07 ROO.23.17.20.08 ROO.23.17.20.10 ROO.23.17.20.11 ROO.23.17.20.12	
	Sangat Jarang	2					
	Sangat Jarang	1					

Tingkat Risiko	Skor	Keterangan
Sangat Rendah	<3	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Rendah	3,01 - 5	Risiko dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
Sedang	5,01 - 10	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan pengelolaan, jika ada termasuk tersedianya sumber daya
Tinggi	10,1 - 15	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan
Sangat Tinggi	15,01 - 25	Risiko tidak diterima, diperlukan tindakan segera

Contoh Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Jambi				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis Pemda		: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
II Risiko Strategis OPD 1						
1	Rasio Penilaian Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/peraturan yang berlaku	RSO.25.17.20.01	4.30	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping Koperasi tidak seimbang dengan jumlah Koperasi yang ada 4 terdapatnya SDM Pengawas koperasi 2 Kurangnya sosialisasi ke Koperasi terkait pembuatan izin koperasi dan pembuatan laporan keuangan 3 terdapatnya anggaran	Rendahnya persentase Koperasi RAT dan Koperasi Sehat
2	Lapangan UMKM rendah	RSO.25.17.20.02	4.30	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terdapatnya anggaran	Rendahnya persentase usaha kecil menjadi wirausaha
3	SDM Pelaku UMKM Rendah	RSO.25.17.20.03	10.62	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terdapatnya anggaran	Rendahnya Omset dan Aset UMKM
4	Pemasaran produk UMKM masih terbatas	RSO.25.17.20.04	11.00	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terdapatnya anggaran	Rendahnya Omset dan Aset UMKM
5	Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah	RSO.25.17.20.05	10.94	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Jumlah Pendamping UMKM tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang ada 2 Kurangnya sosialisasi ke UMKM terkait pembuatan izin dan standarisasi produk UMKM 3 terdapatnya anggaran	Rendahnya Omset dan Aset UMKM
5	UMKM tidak berkembang/tidak naik kelas	RSO.25.17.20.06	7.39	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 SDM Pelaku UMKM Rendah 2 Pelaku UMKM belum memanfaatkan media online sebagai sarana pemasaran produknya 3 Akses pembiayaan UMKM ke perbankan masih rendah 4 Produk UMKM masih rendah dan tidak konsisten kualitasnya	Rendahnya pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM
6	Capaian nilai AKRP tidak memenuhi target	RSO.25.17.20.07	4.30	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1 Dokumen AKRP Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi belum memenuhi standar 2. Dokumen administrasi yang belum memenuhi standar	Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi kurang akuntabel
III Risiko Operasional OPD 1:						
1	Laporan Dokumen Evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.25.17.20.01	4.00	Sekretaris	Minimnya kesadaran dan Pemahaman Pengelola Laporan dalam kewajiban pelaporan tepat waktu	Pada terdapatnya keterlambatan dalam penyusunan laporan kegiatan yang baik, tepat
2	Kurang Akuntabilitasnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.25.17.20.02	4.63	Sekretaris	Kemungkinan keterlambatan dalam penyusunan laporan kegiatan yang baik, tepat	Pada terdapatnya keterlambatan dalam penyusunan laporan kegiatan yang baik, tepat
3	Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.17.20.03	6.00	Sekretaris	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	hal ini berdampak pada kinerja perangkat daerah itu sendiri, sehingga capaian kinerja perangkat daerah dan hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
4	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.04	5.50	Sekretaris	Belum terdapatnya data base inventaris kebutuhan yang menjadi dasar perencanaan dan pemenuhan anggaran	Berdasarkan Burevis dan hasil hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
5	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan belum maksimal	ROO.25.17.20.05	5.00	Sekretaris	Tidak sebandingnya antara anggaran yang tersedia dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Berdasarkan Burevis dan hasil hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
6	Pemakaian kendaraan dinas tidak dilengkapi dengan Berta Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	9.04	Sekretaris	Kurangnya pemahaman pengurus barang belum memahami format dari Berta Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional sesuai	Berdasarkan Burevis dan hasil hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
7	Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Roda, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomi lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusahakan untuk dijual	ROO.25.17.20.07	9.04	Sekretaris	Kelangkaan pengurus barang karena kendaraan dinas roda 4 (empat) dalam kondisi rusak berat belum diusahakan untuk dijual	Berdasarkan Burevis dan hasil hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
8	Kepuasan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaannya, sehingga pengendalian administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan peraturan	ROO.25.17.20.08	9.04	Sekretaris	Kelangkaan pengurus barang dalam melengkapi pengendalian administrasi kendaraan dinas yang belum adanya kartu pemeliharaan kendaraan	Berdasarkan Burevis dan hasil hal tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya inventaris terhadap penggunaan Barang dan Jasa.
9	Grafikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi untuk memudahkan pengurusan bahan verifikasi izin usaha simpan pinjam koperasi	ROO.25.17.20.09	5.82	Kepala Bidang Kewirausahaan Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengurus koperasi dan Tim teknis evaluasi bidang kewirausahaan koperasi	UMKM tidak berkembang
10	Grafikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi pada pengawas koperasi agar hasil penilaian terhadap kesehatan Koperasi "berpeduli" "sehat"/"okup" "sehat"	ROO.25.17.20.10	5.81	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemertuaan Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengawas dan pengurus koperasi	UMKM tidak berkembang
11	Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2024 di Kab/Kota	ROO.25.17.20.11	5.86	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Yang merumuskan peserta adalah kabupaten/kota	UMKM tidak berkembang
12	Belum Optimalnya Pembinaan Koperasi di Kabupaten/Kota pada Kegiatan Fasilitas Koperasi	ROO.25.17.20.12	5.87	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemertuaan Koperasi dan Kepala Bidang	Kurangnya pemahaman pengurus barang belum memahami format dari Berta Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional sesuai	UMKM tidak berkembang
13	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13	6.24	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terdapatnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	0
14	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14	7.13	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Kurangnya anggaran dan terdapatnya SDM yang turun lapangan untuk melakukan verifikasi	UMKM tidak berkembang
15	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15	8.88	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terdapatnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	Mengundang UMKM dalam kegiatan sosialisasi
16	UMKM yang diarah tidak memanfaatkan peraturan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16	7.35	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Pelaku UMKM tidak ingin membuka diri terhadap hal-hal yang bersifat inovatif dan terdapatnya jaringan informasi mengenai pengembangan UMKM	Mengundang UMKM dalam kegiatan sosialisasi
17	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.17	7.30	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Kurangnya anggaran dan terdapatnya SDM yang turun lapangan untuk melakukan verifikasi	UMKM tidak berkembang
18	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18	8.24	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Pelaksanaan kegiatan belum optimal disosialisasikan menggunakan media elektronik	Program Dumitale tidak diketahui masyarakat luas
19	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk menerima dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19	10.91	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Belum ditubuhkan penyelesaian secara optimal terhadap UMKM calon penerima bantuan dan yang mengikuti pelatihan	Pelatihan dan peralatan yang diberikan tidak berdampak bagi pertumbuhan dan omset UMKM
20	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20	7.09	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Tenaga yang ada belum seimbang dengan UMKM yang ada	UMKM yang memiliki izin dan standarisasi produk masih rendah
21	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21	10.50	Kepala Bidang Pembudayaan Usaha Kecil	Kurangnya pemahaman terkait peraturan pelaporan pembayaran honorarium yang berlaku	Berdampak terhadap kesalahan pelaporan serta kerugian finansial

Jambi, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi



Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Provinsi Jambi (Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi)
Tahun Penilaian : 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
a	-		
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
a	-		
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF			
a	-		
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN			
a	-		
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
a	Pembayaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, dan narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia tidak sesuai dengan peraturan presiden No 33 tahun 2020	Supaya optimal dalam mengawasi dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Triwulan I & IV
		Memproses kelebihan pembayaran atas belanja honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah dengan rincian honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan		
b	Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Kedepannya akan dilengkapi Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan dinas dan surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Triwulan II & III
c	Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusulkan untuk dilelang sesuai Peraturan Menteri Dalam	Kedepannya akan diajukan usulan penghapusan aset yang sudah rusak berta ke Bapak Gubernur Jambi	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Triwulan II & III
d	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaanya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016	Atas temuan tersebut ke depan akan kami lengkapi kartu pemeliharaan barang/kartu pemeliharaan kendaraan dinas	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Triwulan II & III
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF			
a	-		
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT			
a	-		

Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi

DRS. SARDANI, MM.
NIP. 19670520 199402 1 001

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Contoh Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi Jambi						
Tahun Penilaian	: 2025						
Tujuan Strategis Pemda	: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.						
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
II	Risiko Strategis						
1	Hasil Penilaian /Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/peraturan yang berlaku	RSO.25.17.20.01	Transparan karena pengurusan izin sudah melalui aplikasi OSS RBA di DPM-PTSP dan Permenkop no 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi	SDM Terbatas, anggaran Terbatas dan Koperasi yang kurang update terhadap regulasi ada	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara Off-site dan Sosialisasi Akses untuk pengurusan izin melalui aplikasi agar jelas dan tidak sulit untuk dipahami	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW II sd IV 2025
2	Legalitas UMKM rendah	RSO.25.17.20.02	Tenaga pendamping KUMKM dan konsultan PLUT	Sosialisasi ke masyarakat kurang	Pengurusan izin melalui aplikasi	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW II 2025
3	SDM Pelaku UMKM Rendah	RSO.25.17.20.03	Pelatihan bagi UMKM	Anggaran terbatas, jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan sangat sedikit	Pelatihan bagi UMKM dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW I s.d IV 2025
4	Pemasaran produk UMKM masih terbatas	RSO.25.17.20.04	Melalui PLUT dan smesco, bazar dan pameran	Anggaran terbatas, jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan sangat sedikit	Pemasaran produk UMKM melalui PLUT dan smesco, bazar dan pameran dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW I s.d IV 2025
5	Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah	RSO.25.17.20.05	Pelatihan produk dan kemasan bagi UMKM oleh konsultan PLUT	Anggaran terbatas, jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan sangat sedikit	Pelatihan produk dan kemasan bagi UMKM oleh konsultan PLUT dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW I s.d IV 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	UMKM tidak berkembang/tidak naik kelas	RSO.25.17.20.06	Facilitasi akses pembiayaan dengan pembuatan SHAT dan kemitraan dengan perbankan dan usaha menengah	Anggaran terbatas, jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan sangat sedikit	Facilitasi akses pembiayaan dengan pembuatan SHAT dan kemitraan dengan perbankan dan usaha menengah kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW I s.d IV 2025
7	Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	RSO.25.17.20.07	Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP	Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik	Akan meningkatkan prioritas terhadap pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil evaluasi AKIP	Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	TW I s.d IV 2025
III Risiko Operasional							
1	Laporan Dokumen Evaluasi SKPD tidak disampaikan tepat waktu	ROO.25.17.20.01	SAKIP, LKJ, PAKET, SIMANTAP, DLL	Minimnya SDM perencana dan cukup sulitnya berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga laporan sering keteteran atau tidak tepat waktu	Penguatan koordinasi dengan pihak terkait perlu di tingkatkan dan penambahan anggaran untuk pendidikan perencana harus diusulkan	Sekretaris	Triwulan I,II,III,IV
2	Kurang Akuntabelnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	ROO.25.17.20.02	SIPD RI	Lebih cermat dan sering komunikasi	Mengimplementasikan aplikasi yang terintegrasi sehingga proses administrasi mudah dan tepat	Sekretaris	Triwulan I,II,III,IV
3	Ketersediaan Alokasi Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.17.20.03	RKA 2024 DPA 2024 RKA PERUBAHAN DPA PERUBAHAN	Menghitung kembali kebutuhan yang ada dengan kemampuan anggaran yang tersedia	Mulai melakukan perhitungan yang cermat dan tepat agar pembagian anggaran tepat sasaran	Sekretaris	Triwulan I,II,III,IV
4	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan penganggaran belum maksimal	ROO.25.17.20.04	RKBMD 2024	Minimnya SDM perencana yang mampu menghitung kebutuhan secara optimal	Perlu dilakukan pelatihan khusus, seperti pelatihan penyusunan anggaran	Sekretaris	Triwulan I,II,III,IV
5	Akurasi perhitungan kebutuhan dalam perencanaan belum maksimal	ROO.25.17.20.05	RKBMD 2024	Minimnya SDM perencana yang mampu menghitung kebutuhan secara optimal	Pembentukan tim penyusun penganggaran internal dinas agar akurasi perhitungan biaya bisa optimal	Sekretaris	Triwulan I,II,III,IV
6	Pemakaian kendaraan dinas jabatan tidak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan	ROO.25.17.20.06	Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan	Pelaksana kegiatan kurang teliti dalam melaksanakan teknis kegiatan	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	Sekretaris	TW II sd IV 2025
7	Terdapat 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) Pool, dengan kondisi rusak berat dan tidak dikeluarkan biaya pemeliharaannya dikarenakan secara ekonomis lebih menguntungkan untuk dijual akan tetapi belum diusulkan untuk	ROO.25.17.20.07	Pengajuan usulan penghapusan aset yang sudah rusak berta ke Bapak Gubernur Jambi	Pelaksana kegiatan kurang teliti dalam melaksanakan teknis kegiatan	Menginventarisasi aset-aset yang sudah rusak berat untuk segera diusulkan penghapusan/lelang aset ke Bapak Gubernur Jambi	Sekretaris	TW II sd IV 2025
8	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas belum dibuatkan kartu pemeliharaanya, sehingga pengamanan administrasi kendaraan dinas belum dilakukan sesuai dengan peraturan	ROO.25.17.20.08	Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan	Pelaksana kegiatan kurang teliti dalam melaksanakan teknis kegiatan	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	Sekretaris	TW II sd IV 2025

9	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi untuk memudahkan pengurusan bahan verifikasi izin usaha simpan pinjam koperasi	ROO.25.17.2 0.09	Permenkop No 8 Tahun Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengurus koperasi dan Tim teknis evaluasi bidang kelembagaan koperasi	Transparan karena pengurusan izin sudah melalui aplikasi OSS RBA di DPM-PTSP	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	
10	Gratifikasi yang diberikan oleh Pengurus koperasi pada pengawas koperasi agar hasil penilaian terhadap kesehatan Koperasi berpredikat "sehat"/"cukup sehat"	ROO.25.17.2 0.10	Permenkop No 9 Tahun Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi	Tingginya interaksi secara langsung antara pengawas dan pengurus koperasi	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara Off-site	Kepala bidang Pengawasan Koperasi	
11	Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA 2024 di Kab/Kota	ROO.25.17.2 0.11	Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Peraturan yang mengatur pelaksanaan PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM	Kurangnya Pengetahuan/Pemahaman dalam meningkatkan kualitas koperasi	Mempedomi Permenkop UKM No 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	
12	Belum Optimalnya Pembinaan Koperasi di Kabupaten/Kota pada Kegiatan Fasilitasi Koperasi	ROO.25.17.2 0.12	Permenkop No 3 Tahun 2021 tentang Peraturan yang mengatur pelaksanaan PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan KUMKM	Kurangnya Pengetahuan/Pemahaman dalam meningkatkan kualitas koperasi	Mempedomi Permenkop UKM No 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	
13	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13	Sosialisasi tentang peraturan presiden No 33 tahun 2020 kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan	Ketidacermatan dalam melaksanakan kegiatan	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW I s.d IV 2025
14	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14	Penyusunan Juknis	Juknis terlambat dalam penyusunan dan disosialisasikan	Diadakan Desiminasi Dumisake dan perekrutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd III 2025
15	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15	Sosialisasi melalui Media dan Tenaga Pendamping /Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota	Sosialisasi belum optimal	Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping /Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd III 2025

16	UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16	UMKM calon penerima wajib membuat proposal dan mematuhi syarat yang telah ditentukan	UMKM tidak mematuhi syarat yang telah di sepakati	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd IV 2025
----	---	-----------------	--	---	--	--	------------------

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
17	Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.25.17.20.17	NIB menjadi salah satu persyaratan dalam menerima bantuan dan mengikuti pelatihan	UMKM tidak memanfaatkan hasil pelatihan /bantuan sesuai dengan peruntukannya	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd IV 2025
18	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18	Sosialisasi tentang peraturan presiden No 33 tahun 2020 kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang bersangkutan	Ketidacermatan dalam melaksanakan kegiatan	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW I s.d IV 2025
19	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19	Mengadakan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya	UMKM masih belum dikelola secara profesional masih bersifat dan dikelola keluarga	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd IV 2025
20	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20	Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi yang membidangi koperasi dan tenaga Pendamping agar mengusulkan sesuai yang diminta	masih terdapat unsur kepentingan dalam pengusulan calon	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd IV 2025
21	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21	Melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM	Kurangnya literasi perbankan sehingga belum memanfaatkan peluang pembiayaan dari pihak lembaga keuangan /Perbankan	Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	TW II sd IV 2025

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Jambi, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi



Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

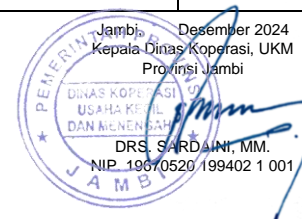
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Jambi					
Tahun Penilaian		: 2025					
Tujuan Strategis Pemda		: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Pengurusan izin melalui aplikasi	Sosialisasi ke masyarakat	Diskop,UKM	Staf Diskop	TW II sd IV 2025	-	-
2	Pelatihan bagi UMKM dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Pelatihan	Diskop,UKM	Staf Diskop	TW II sd IV 2025	-	-
3	Pemasaran produk UMKM melalui PLUT dan smesco, bazar dan pameran dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Pelatihan	Diskop,UKM	Staf Diskop	TW II sd IV 2025	-	-
4	Pelatihan produk dan kemasan bagi UMKM oleh konsultan PLUT dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Pelatihan	Diskop,UKM	Staf Diskop	TW II sd IV 2025	-	-
5	Fasilitasi akses pembiayaan dengan pembuatan SHAT dan kemitraan dengan perbankan dan usaha menengah kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Pelatihan	Diskop,UKM	Staf Diskop	TW II sd IV 2025	-	-
6	Akan meningkatkan prioritas terhadap pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil evaluasi AKIP	Rapat	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW I s.d IV 2025	-	-
7	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Rapat	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW II sd IV 2025	-	-
8	Diadakan Desimenasi Dumisake dan perekutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake	Rapat	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW II sd IV 2025	-	-
9	Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping /Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota	Rapat	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW II sd IV 2025	-	-
10	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Uji Petik	Diskop,UKM	UMKM	TW II sd IV 2025	-	-
11	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Uji Petik	Diskop,UKM	UMKM	TW II sd IV 2025	-	-
12	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi		Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW I s.d IV 2025	-	-
13	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Uji Petik	Diskop,UKM	UMKM	TW II sd IV 2025	-	-
14	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Uji Petik	Diskop,UKM	UMKM	TW II sd IV 2025	-	-
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
15	Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan	Bimtek	Diskop,UKM	UMKM	TW II sd IV 2025	-	-
16	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Rapat	Diskop,UKM		TW II sd IV 2025	-	-

17	Menginventarisasi aset-aset yang sudah rusak berat untuk segera diusulkan penghapusan/lelang aset ke Bapak Gubernur Jambi	Laporan	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW II sd IV 2025	-	-
18	Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	Rapat	Diskop,UKM	Staf Diskop , Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM Kab /Kota	TW II sd IV 2025		

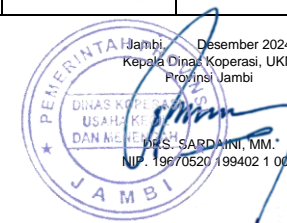


Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Jambi				
Tahun Penilaian		: 2025				
Tujuan Strategis		: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Pengurusan izin melalui aplikasi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
2	Pelatihan bagi UMKM dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
3	Pemasaran produk UMKM melalui PLUT dan smesco, bazar dan pameran dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
4	Pelatihan produk dan kemasan bagi UMKM oleh konsultan PLUT dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
5	Fasilitasi akses pembiayaan dengan pembuatan SHAT dan kemitraan dengan perbankan dan usaha menengah kolaborasi anggaran pusat dan APBD	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
6	Akan meningkatkan prioritas terhadap pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil evaluasi AKIP	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
7	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
8	Diadakan Desimenasi Dumisake dan perekutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
9	Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping /Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
10	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
11	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
12	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
13	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
14	Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
15	Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
16	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
17	Menginventarisasi aset-aset yang sudah rusak berat untuk segera diusulkan penghapusan/lelang aset ke Bapak Gubernur Jambi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		
18	Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	Konfirmasi persiapan dan laporan kegiatan	Kepala Dinas Koperasi,UKM	TW II sd IV 2025		



Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
 Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
 Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
 Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
 Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
 Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi Jambi								
Tahun Penilaian		: 2025								
Tujuan Strategis		: Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.								
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
II	Risiko Strategis									
1	Hasil Penilaian /Rekomendasi yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat/peraturan yang berlaku	RSO.25.17.20.01					Melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara Off-site dan Sosialisasi Akses untuk pengurusan izin melalui aplikasi agar jelas dan tidak sulit untuk dipahami	TW II sd IV 2025		
2	Legalitas UMKM rendah	RSO.25.17.20.02					Pengurusan izin melalui aplikasi	TW II 2025		
3	SDM Pelaku UMKM Rendah	RSO.25.17.20.03					Pelatihan bagi UMKM dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	TW I s.d IV 2025		
4	Pemasaran produk UMKM masih terbatas	RSO.25.17.20.04					Pemasaran produk UMKM melalui PLUT dan smesco, bazar dan pameran dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	TW I s.d IV 2025		
5	Produk UMKM secara kualitas dan kuantitas masih rendah	RSO.25.17.20.05					Pelatihan produk dan kemasan bagi UMKM oleh konsultan PLUT dengan kolaborasi anggaran pusat dan APBD	TW I s.d IV 2025		
6	UMKM tidak berkembang/tidak naik kelas	RSO.25.17.20.06					Fasilitasi akses pembiayaan dengan pembuatan SHAT dan kemitraan dengan perbankan dan usaha menengah kolaborasi anggaran pusat dan APBD	TW I s.d IV 2025		
7	Capaian nilai AKIP tidak memenuhi target	RSO.25.17.20.07					Akan meningkatkan prioritas terhadap pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil evaluasi AKIP	TW I s.d IV 2025		
III	Risiko Operasional									
1	Pelaku UMKM tidak berkeinginan di fasilitasi dalam hal pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	ROO.25.17.20.13					Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	TW I s.d IV 2025		
2	Bantuan tidak tepat sasaran	ROO.25.17.20.14					Diadakan Desimenasi Dumisake dan perekrutan Tenaga Pendamping KUMKM /Dumisake	TW II sd III 2025		
3	Informasi kurang disosialisasikan ke masyarakat	ROO.25.17.20.15					Berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping /Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM kabupaten/Kota	TW II sd III 2025		
4	UMKM yang dilatih tidak memanfaatkan peralatan dan pelatihan yang diberikan	ROO.25.17.20.16					Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	TW II sd IV 2025		
5	Izin yang dikeluarkan tidak dimanfaatkan secara optimal	ROO.25.17.20.17					Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	TW II sd IV 2025		
6	Pelaporan pembayaran honorarium narasumber dan moderator yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	ROO.25.17.20.18					Melakukan tindakan verifikasi dan evaluasi	TW I s.d IV 2025		
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
7	UMKM yang difasilitasi belum siap untuk bermitra dan kualitas dan kuantitas produk masih rendah	ROO.25.17.20.19					Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	TW II sd IV 2025		
8	Peserta kurang tepat sasaran	ROO.25.17.20.20					Dilakukan evaluasi dan UMKM wajib melaporkan perkembangan usahanya	TW II sd IV 2025		

9	Sertifikat tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha	ROO.25.17.20.21					Mengadakan pelatihan literasi hukum dan perbankan	TW II sd IV 2025		
10		0	0				Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	TW II sd IV 2025		
11		0	0				Menginventarisasi aset-aset yang sudah rusak berat untuk segera diusulkan penghapusan/lelang aset ke Bapak Gubernur Jambi	TW II sd IV 2025		
12		0	0				Melakukan tindakan verivikasi dan evaluasi	TW II sd IV 2025		

Jambi, Desember 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi

DRS. SARDAINI, MM.
NIP. 19670520 199402 1 001

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan